

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam Teori keagenan *Agency Theory* bahwa telah dijelaskan mengenai hubungan antara *principal* dan *agent*. Teori keagenan *Agency Theory* dapat juga diartikan sebagai suatu timbal balik yang muncul ketika satu pihak *principal* memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain atau *agent* untuk melakukan pengambilan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain *agent* untuk melakukan pengambilan keputusan sesuai kepentingan *principal* (Jensen dan Meckling, 1976). Di dalam sebuah sektor pemerintahan, masyarakat selaku *principal* memberikan telah amanah dan percaya kepada pemerintah selaku *agent*. Pemerintah selaku *agent* yang menjadi pemegang amanah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut tanpa melakukan kecurangan atau *fraud*.

Kemudian yang terjadi adalah masalah keagenan yang cenderung muncul ketika eksekutif berkeinginan memaksimalkan *self interest*-nya dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak selama ini baik. Disamping itu juga untuk mengamankan posisinya rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap *oportunis* dan cenderung tidak menyukai resiko. Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu menyajikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas (Mardiasmo, 2004). Selain itu kaitanya dengan pencegahan adalah bahwa teori agen mempercayakan kepada pemerintah setempat atas berlangsungnya siklus dalam suatu pemerintahan, masyarakat percaya bahwa setiap pejabat atau karyawan dalam suatu organisasi pemerintahan enggan melakukan tindakan kecurangan atau *fraud*, ketika sebuah organisasi melakukan tindak kecurangan maka pihak *principal* atau masyarakat akan ikut bertindak atas penyimpangan yang terjadi di dalam suatu lembaga pemerintahan.

2.2 *Whistleblowing system*

Whistleblowing dapat diartikan sebagai suatu peristiwa atau tindakan pelaporan kecurangan maupun pelanggaran yang dilakukan seseorang di dunia kerja. Biasanya, pelaporan semacam ini bisa dilakukan oleh seseorang yang berada dalam satu lingkup kerja atau bahkan klien atau relasi kerja yang mengetahui terjadinya tindak kecurangan tersebut. Yang biasanya terjadi adalah, pelaporan atas tindak kecurangan yang dilakukan oleh rekan kerja atau atasan ini ternyata dibocorkan oleh pihak lain. Dapat pula diartikan bahwa pelaporan pelanggaran ini sendiri adalah suatu tindakan atas sikap kecurangan yang bisa jadi ditemui dalam lingkup kerja, di dalam sebuah organisasi, *whistleblowing system* bisa menjadi sesuai yang positif jika memang pelaporan ini mendapat buntut penyelesaian yang jelas dan akar masalahnya bisa dipecahkan. Namun sebaliknya, bisa menjadi negatif jika kemudian persoalan ini merembet hingga ke pihak atau oknum di luar perusahaan yang tidak berkepentingan, oknum tersebut bisa saja memanfaatkan tindakan pelaporan

pelanggaran ini sebagai informasi tambahan demi menjatuhkan perusahaan kompetitor. Dalam hal itu maka, dibutuhkan adanya kebijaksanaan dari pemimpin dalam memberikan pengayoman kepada seluruh karyawan untuk senantiasa bekerja secara bersih dan jujur. (www.jejenomic.com).

Whistleblower adalah individu yang akan datang kepada suatu organisasi atau individu secara tertutup untuk melaporkan kemungkinan kecurangan, aktivitas yang tidak jujur atau kecurangan lain yang dilakukan oleh orang lain di tempat kerja. Pada umumnya, para whistleblower ini akan mencari perlindungan dari tindakan semena-mena atau terdampak konsekuensi buruk karena telah melaporkan kecurangan. Akan tetapi, laporan 2015 Asia-Pacific Fraud Survey Report, dari perusahaan akuntan Ernst and Young (EY), 45% dari perusahaan yang disurvei di wilayah tersebut mengakui bahwa mereka belum menerapkan hotline whistleblower. (www.jejenomic.com).

2.3 Budaya Organisasi

Kecurangan tentang adanya fraud dalam sebuah organisasi dapat digolongkan kedalam suatu budaya organisasi, budaya organisasi dapat diartikan sebagai sistem yang dianut oleh para anggota suatu organisasi atau perusahaan yang digunakan untuk membedakan organisasi atau perusahaan itu dari organisasi atau perusahaan yang lain, budaya organisasi adalah nilai yang dirasakan bersama oleh para anggota yang dapat diwujudkan dalam bentuk sikap atau sebuah perilaku atau komitmen dalam sebuah organisasi yang bernaung (Tuannakota, 2010). Budaya organisasi di dalam sebuah pemerintahan merupakan suatu kerangka kerja yang menjadi pedoman bagaimana bertingkah laku sehari-hari serta digunakan sebagai pembuat keputusan untuk karyawan dan mengarahkan tindakan mereka agar tujuan dari organisasi tersebut bisa dicapai. Budaya organisasi dapat digunakan sebagai salah satu alat bagi para manajemen untuk mencapai efisiensi, efektivitas, kreatifitas dan etos kerja seperti yang telah diterapkan oleh perusahaan di berbagai negara maju seperti jepang, amerika dan lainnya (Sutrisno, 2013).

Budaya berarti melakukan segala hal dengan jujur dan penuh etika yang akan menjadi salah satu faktor untuk mencegah terjadinya kecurangan di sebuah intra organisasi. Budaya tersebut akan menanamkan sikap terhadap individu yang menerapkannya dapat memiliki satu sikap atau sikap untuk merasakan ikut memiliki atau yang sering disebut dengan *sense of belonging* serta memiliki rasa bangga karena menjadi bagian bagian dari sebuah organisasi yang biasa disebut dengan *sense of identy* (Beasley, 2018). Budaya organisasi yang unggul akan menciptakan rasa kebanggaan diantara pekerja dan partisipasinya mereka disuatu aspek organisasi dengan diterapkannya budaya organisasi para karyawan akan merasa nyaman dengan apa yang mereka kerjakan.

Menurut Robin (2008) terdapat enam karateristik budaya organisasi yaitu :

1. Inisiatif individual

Yaitu tingkat tanggung jawab kebebasan atau independensi yang dipunyai setiap individu dalam mengemukakan pendapat. Inisiatif individu tersebut perlu dihargai oleh kelompok atau pimpinan disebuah organisasi yang mencakup ide untuk memajukan daya perusahaan.

2. Toleransi terhadap tindakan berisiko

Dalam budaya organisasi perlu ditekankan sejauh mana para karyawan untuk melakukan tindakan agresif, inovatif dan mengambil risiko, suatu budaya organisasi dapat dipandang baik apabila dapat memberikan toleransi kepada karyawan untuk berani mengambil risiko terhadap apa yang dilakukannya.

3. Pengarahan

Pengarahan dimaksudkan sejauh mana suatu organisasi dapat menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan yang diinginkan sasaran dan harapan tersebut jelas tercantum di dalam visi, misi dan tujuan organisasi, kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi

4. Integrasi

Integrasi dimaksudkan sejauh mana organisasi yang mendorong unit-unit organisasi untuk bekerja dengan cara terkordinasi kekompatan unit-unit organisasi dalam bekerja dapat mendorong kualitas pekerjaan yang dapat dihasilkan oleh pekerja.

5. Dukungan Manajemen

Dukungan manajemen dimaksudkan sejauh mana para manajer dapat memberikan komunikasi atau arahan dan bantuan yang jelas terhadap bawahan perhatian manajer terhadap karyawan dapat membantu kelancaran kinerja suatu organisasi.

6. Kontrol

Alat kontrol yang dapat dipakai adalah peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku di dalam organisasi untuk itu di perlukanya sejumlah peraturan dan tenaga pengawas atau atasan dimana tempat bekerja yang dapat digunakan untuk mengawasi dan juga mengendalikan perilaku karyawan dalam sebuah organisasi

2.4 Pengendalian Internal

Pengendalian intern dapat diartikan sebagai suatu rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga dan melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat, meningkatkan efisiensi, dan mendorong untuk wajib ditaatinya kebijakan yang diberlakukan oleh manajemen (Mulyadi, 2020). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral disebuah tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP No. 60, 2008).

Sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang baik adalah sistem akuntansi yang didalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai (Mahmudi, 2010). Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (PP No. 60, 2008).

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (*intern accounting control*) dan pengendalian intern administratif (*internal administrative control*). Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam organisasi dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pencegahan fraud pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam hal ini menetapkan kebijakan, sistem dan juga prosedur yang berlaku bahwa tindakan yang dilakukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya dalam sebuah organisasi atau perusahaan dan juga pemerintahan yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi, efektivitas dan efisiensi operasi keandalan laporan keuangan dan kepatuhan hukum yang berlaku (COSO, 2002). Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian yang paling banyak diterapkan, pengendalian ibarat pagar yang melindungi pencurian yang masuk ke rumah orang namun bagaimanapun kokohnya kan tetap dapat ditembus oleh perilaku *fraud* yang aktif yang mempunyai nyali untuk melakukan tindak kecurangan tersebut.

2.4.1 Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Adapun unsur sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 antara lain:

1. Lingkungan pengendalian

Dalam unsur lingkungan pengendalian, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan atas peran serta aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif serta melalui hubungan kerja yang baik dengan instansi-instansi pemerintah lainnya.

2. Penilaian resiko

Penilaian resiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun tingkat kegiatan. Kemudian mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap resiko yang telah diidentifikasi maka dilakukan analisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan manajemen resiko dan kegiatan pengendalian resiko yang diperlukan untuk memperkecil resiko.

3. Kegiatan pengendalian

Komponen penting yang terkait dengan sistem pengendalian intern khususnya kegiatan pengendalian antara lain:

a. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah.

b. Otorisasi

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem

otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau ketika terdapat transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah dan ilegal.

c. Formulir, dokumen dan catatan

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

d. Pemisahan tugas

Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pemegang uang dengan pencatat uang serta pemberi otorisasi. kemudian dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan dan korupsi.

1. Informasi dan komunikasi

Setiap instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non-keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal/internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan instansi pemerintah terkait dan dengan instansi lainnya di seluruh ruang lingkup instansi pemerintah tersebut berada dan terhadap pihak yang turut berkepentingan didalamnya, serta dalam periode waktu tertentu, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.

2. Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas SPI yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

2.5 Tingkat Religiusitas

Religiusitas adalah suatu keadaan, pemahaman dan ketaatan seseorang dalam meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengamalan nilai, aturan, kewajiban sehingga mendorongnya bertingkah laku, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari (Ghufron, 2012). Religiusitas dapat dikatakan juga sebagai tingkat konsepsi seseorang terhadap agamanya, sedangkan yang dimaksud dengan tingkat komitmen adalah suatu hal yang harus dipahami secara menyeluruh, sehingga mengakibatkan setiap individu menjadi religius (Sari,

Yunita, 2012) dalam hal ini agama adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai dan juga sistem perilaku yang telah terlembagakan yang semua terpusat di dalam sesuatu yang dihayati sebagai yang paling maknawi (Suroso, 2008).

Di dalam ajaran islam religius pada garis besarnya tercermin dalam pengamalan akidah syariah dan juga akhlak atau dengan ungkapan lain iman, islam dan lisan jika seluruh komponen tersebut dimiliki oleh individu maka dia insan yang beragama sesungguhnya (Effendi, 2008). Istilah religi atau agama menunjuk pada aspek formal yang berkaitan dengan aturan-aturan serta kewajiban sedangkan religius menunjuk pada aspek formal yang berkaitan dengan aspek individu. Religiusitas dapat diketahui dengan menggunakan skala religiusitas yang disusun berdasarkan aspek-aspek religiusitas dari Glock dan Strak (dalam Nur dan Rini, 2010) yang meliputi dimensi keyakinan, peribadatan, penghayatan, pengetahuan agama dan pengalaman diantaranya :

a. Dimensi keyakinan (*the ideological dimension*)

Dimensi keyakinan adalah sejauh mana seseorang menerima dan mengakui hal-hal yang dogmatik dalam agamanya. Misalnya keyakinan adanya sifat-sifat Tuhan, adanya malaikat, surga, para nabi dan sebagainya.

b. Dimensi peribadatan dan praktik agama (*the ritualistik dimension*)

Dimensi ini adalah sejauh mana seseorang menunaikan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Misalnya menunaikan shalat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya Dimensi feeling atau penghayatan (*the experiential dimension*) Dimensi penghayatan adalah perasaan keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan seperti merasa dekat dengan Tuhan, tenang saat berdoa, tersentuh mendengar ayat kitab suci, merasa takut berbuat dosa, merasa senang doanya terkabulkan, dan sebagainya.

c. Dimensi pengetahuan agama (*the intellectual dimension*)

Dimensi ini adalah seberapa jauh seseorang mengetahui dan memahami ajaran-ajaran agamanya terutama yang ada dalam kitab suci atau hadis, pengetahuan tentang fikih, dan sebagainya.

d. Dimensi effect atau pengamalan (*the consequential dimension*)

Dimensi pengalaman adalah sejauh mana implikasi ajaran agama mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sosial. Misalnya mendermakan sebagian harta untuk keagamaan dan sosial, menjenguk orang sakit, mempererat silaturahmi dan sebagainya.

Kehidupan beragama dengan perilaku bermoral sukar dipisahkan. Kehidupan bermoral adalah sikap dan tingkah laku yang baik, sedangkan tujuan agama yang penting adalah membentuk manusia bermoral dalam masyarakat. Hampir semua kehidupan bermoral dalam masyarakat berasal dari moralitas agama, kepercayaan kepada agama yang dianutnya dengan penghayatan dan pengalaman didalam mengembangkannya dengan Tuhan dengan perasaan ikhlas, hormat, sukarela dan takjub kemudian di praktekkan dalam tindakan sehari-hari (Ahyadi, 2003).

Penurunan moral yang terjadi dalam masyarakat modern adalah karena lengah dan kurang mengindahkan agama. Jika kemajuan dalam masyarakat disertai dengan keimanan dan ketentuan dalam beragama, niscaya akan tercipta kedamaian dalam hidup, karena memberikan ketenangan batin, sehingga dapat mengatur dan mengendalikan tingkah laku, sikap dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh agama yang diyakininya. Saat seseorang melakukan perbuatan curang ada norma-norma yang dilanggarnya, seperti norma kesusilaan dan aturan agama, dalam agama kecurangan merupakan suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai dosa, karena ada beberapa

aspek yang membahas tentang penghayatan dalam menjalankan larangan dan perintah agama. Kecurangan dianggap ketidak taatan seseorang terhadap perintah atau larangan yang sudah ditetapkan agama yang dianutnya (Rini, 2010). Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa religiusitas seseorang akan memberikan pengaruh terhadap pikiran dan perasaan orang. Dengan agama, manusia akan mendapatkan kepercayaan diri, rasa optimis serta perasaan tenang. Manusia akan lebih tahan dalam menghadapi cobaan jika dia menginternalisasikan ajaran-ajaran agama dalam kehidupannya. Dengan religiusitas manusia meraslebih dekat dengan Tuhan, sehingga perilakunya akan lebih sesuai kepada norma agama yang di anutnya, dan akan lebih bertanggung jawab serta jujur dengan apa yang dia lakukan (Ahyadi, 2001). Religiusitas dapat berpengaruh terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan moralitas dalam masyarakat seperti kecurangan dalam sebuah organisasi atau pemerintah yang dijalankan.

2.6 Pencegahan Kecurangan atau *fraud*

Dalam akuntansi, dikenal dua jenis kesalahan yaitu kekeliruan atau *error* yang mengandung unsur ketidaksengajaan dan kecurangan atau *fraud* yang bisanya memang disengaja untuk menaikkan harga saham perusahaan. *fraud* merupakan tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain (perorangan, perusahaan atau institusi). Terjadinya suatu *fraud* disebabkan oleh beberapa alasan dan faktor yang mempengaruhinya (Jurnal.id). pada dasarnya fraud adalah sebuah tindakan yang merugikan berbagai pihak akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukannya, fraud salah satu hal yang saat ini termasuk sulit untuk diberantas, contohnya adalah tindakan korupsi yang terjadi pada negara kita sudah tersusun secara sistematis dan dilakukan dengan sistematis pula, namun hal itu dapat kita cegah apabila suatu organisasi dapat bekerjasama dalam pencegahan tindak kecurangan atau *fraud*. Mengacu pada Albrecht, Albrecht, Albrecht, dan Zimbelman, (2009) salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah fraud yaitu dengan mengurangi peluang terjadinya fraud dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

a. Memiliki Sistem Pengendalian Yang Baik

Berkaitan dengan pengendalian internal, Committee of Sponsoring Organizations (COSO) mengharuskan perusahaan untuk memiliki kerangka pengendalian internal di suatu organisasi adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Merupakan lingkungan kerja yang diciptakan atau dibentuk oleh perusahaan bagi para karyawan.

Unsur – unsur lingkungan pengendalian meliputi hal-hal berikut:

- a. Peran dan contoh manajemen
- b. Komunikasi manajemen
- c. Perekrutan yang tepat
- d. Struktur organisasi yang jelas
- e. Internal audit perusahaan yang efektif

2. Arus komunikasi dan informasi yang baik (sistem akuntansi)

Setiap fraud yang terjadi pasti meliputi tindakan kecurangan, menyembunyikan kecurangan, dan konversi. Oleh karena sistem akuntansi yang baik dan benar dapat menyediakan jejak audit yang

dapat membantu fraud ditemukan dan mempersulit penyembunyian. Sistem akuntansi yang baik harus memastikan bahwa transaksi yang tercatat mencakup kriteria berikut:

- a. Sah
- b. Ditorisasi dengan benar
- c. Lengkap
- d. Diklasifikasikan dengan benar
- e. Dilaporkan pada periode yang benar
- f. Dinilai dengan benar
- g. Diikhtisarkan dengan benar

3. Aktivitas atau prosedur pengendalian

Agar perilaku karyawan sesuai dengan apa yang diinginkan Anda sebagai pebisnis dan membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya, tentu diperlukan lima prosedur pengendalian yang utama:

- a. Pemisahan tugas atau pengawasan ganda
- b. Sistem otorisasi
- c. Pengecekan independen
- d. Pengamanan fisik
- e. Dokumen dan pencatatan

2.6.1 Kondisi Penyebab terjadinya *fraud*

Menurut Tunggal (2012) Terdapat beberapa kondisi yang mengakibatkan terjadinya fraud yaitu :

a. Kesempatan atau *Opportunity*

Kesempatan melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Umumnya, manajemen suatu organisasi atau perusahaan memiliki potensi yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan. Tetapi, patut digarisbawahi bahwa kesempatan melakukan kecurangan akan selalu ada pada setiap level kedudukan.

b. Pengungkapan atau *Exposure*

Terungkapnya suatu kecurangan dalam organisasi atau perusahaan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut, baik oleh pelaku yang sama maupun yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.

c. Kebutuhan atau *Need*

Berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan pegawai atau pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan, instansi, atau organisasi tempat dia bekerja. Selain itu, tekanan (*pressure*) yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan. *Need* atau kebutuhan adalah salah satu faktor individu yang bersifat sangat personal dan diluar kendali dari suatu organisasi tersebut sehingga peraturan perundang-undanganpun sulit sekali untuk ditaati, dengan alasan kebutuhan yang mendasai ditambah dengan faktor pendorong nya, kebutuhan seseorang tersebut akan mendorongnya untuk melakukan tindak kecurangan.

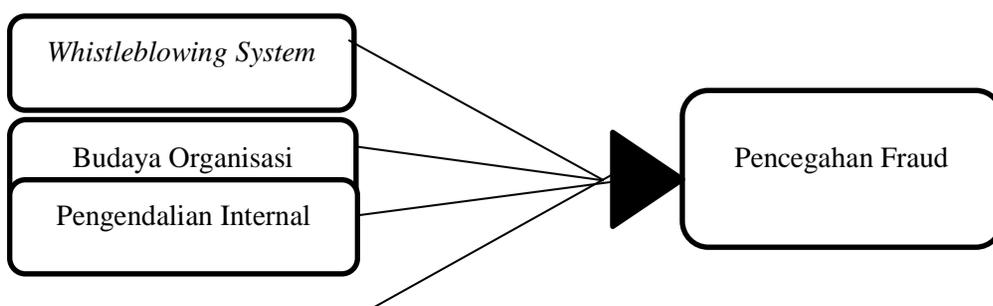
1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 4.7 Penelitian terdahulu

No	Nama peneliti dan tahun	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Made Vonny Herliana (2017)	Pengaruh religiusitas dan spiritualitas terhadap kecurangan akademik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dan spiritualitas berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik.
2.	Yesi Mutiara Basri (2017)	Pengaruh dimensi budaya dan Religiusitas terhadap kecurangan pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi budaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pajak, sedangkan religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan pajak
3.	Trisna Wulandari (2017)	Pengaruh budaya organisasi, Peran audit Internal dan Whistleblowing terhadap pencegahan kecurangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan, Peran audit dan whistleblowing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan.
4.	Widya Novianti Rahayu (2018)	Pengaruh sikap, Persepsi kontrol perilaku dan religiusitas terhadap niat whistleblowing eksternal-internal dengan persepsi dukungan organisasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap, persepsi kontrol dan perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat whistleblowing eksternal-internal dengan persepsi dukungan organisasi
5	Komang Chandra Restalini Anindya (2020)	Pengaruh Whistleblowing system, budaya organisasi dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud pada PT pelabuhan Indonesia III	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Whistleblowing system berpengaruh negatif terhadap pencegahan fraud sedangkan budaya organisasi dan moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pada PT pelabuhan Indonesia III

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.9 Bangunan Hipotesis

Tingkat Religiusitas

2.9 Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap pencegahan *fraud*

Mekanisme pelaporan kecurangan dalam sebuah organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan whistleblowing mekanisme ini digunakan sebagai bentuk penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Jika pegawai suatu organisasi melihat atau mengetahui dugaan Tindak Pidana Korupsi atau bentuk pelanggaran lainnya yang dilakukan pegawai Pemerintah atau organisasi sekitar mereka bisa menggunakan whistleblowing system sebagai mekanisme cara mereka melaporkan tindak kecurangan yang terjadi tersebut.

Whistleblowing system adalah salah satu bentuk dari pengendalian intern dalam mencegah dan menagkap tindak kecurangan yang terdapat di dalam suatu organisasi, *whistleblowing* dapat digunakan oleh perusahaan manapun untuk melaporkan pelanggaran dari masing masing sebuah organisasi. Yang biasa terjadi adalah seorang *whistleblower* akan melaorkan tindak kecurangannya ke otoritas internal terlebih dahulu kemudian merambah kepada otoritas yang lebih tinggi misalnya kepada dewan direksi, komisaris, kepala kantor, atau kepala otoritas publik diluar organisasi yang berwenang (Sumendawai dkk, 2011)

Salah satu manfaat dari adanya penyelenggaraan whistleblowing yang baik adalah timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, karena kepercayaan efektifitas terhadap laporan, whistleblowing digunakan bukan hanya sebagai pelaporan kecurangan yang terjadi namun digunakan juga sebagai bentuk pengawasan, keberadaan sistem ini memberikan efek takut kepada setiap karyawan untuk melakukan tindak kecurangan karena selama kegiatan satu sama lain sudah melakukan pengawasan hal inilah yang dapat dikatakan sebagai pencegahan terjadinya fraud (Nugroho, 2017).

Hasil penelitian yang mendukung tentang pengaruh whistleblowing, budaya organisasi, penegendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dilakukan oleh Anandya (2017) bahwa *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Kemudian hasil penelitian wulandari (2017) disimpulkan bahwa whistleblowing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Berlandaskan hal tersebut maka hipotesis penelitian yang bisa dirumuskan yaitu :
H₁ : *Whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan fraud

2.9.3 Pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud*

Budaya organisasi bisa diartikan sebagai karakteristik dan pedoman yang dianut oleh para anggota organisasi atau kelompok usaha tertentu. Perlu dipahami bahwa budaya ini berperan penting untuk mendorong dan meningkatkan efektivitas kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, budaya organisasi juga berguna sebagai alat untuk menentukan arah organisasi dan mengarahkan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak. Tanpa budaya organisasi yang kokoh, kinerja para anggotanya tidak dapat berjalan secara optimal. Itu sebabnya, budaya organisasi menjadi hal yang krusial untuk dimiliki setiap organisasi.

Salah satu faktor yang dapat mencegah kecurangan menurut Arens (2008) adalah budaya yang jujur dan etika yang tinggi. Teori tersebut diperkuat dengan Tunggal (2020) yang menyatakan bahwa kecurangan dapat dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Corporate Governance. Pemerintahan bertanggung jawab untuk menerapkan budaya yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Anandya (2017) membuktikan bahwa perilaku tidak etis semakin rendah dari kecurangan akuntansi sehingga budaya akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan budaya akuntansi.

Bersadarkan teori penelitian terhadalu menyatakan bahwa budaya organisasi yang baik sangat penting dalam mencegah terjadinya kecurangan. Tindakan pencegahan dapat diterapkan melalui budaya kerja yang dikembangkan dengan baik akan menghasilkan nilai-nilai fundamental organisasi yang baik seperti mnejunjung kejujuran dan integritas penghargaan dari kualitas kerja serta pelayanan yang prima serta keterbukaan dan transparasi. Sehingga dapat diambil kesimpulan semakin baik budaya organisasi maka akan semakin meningkat pemcegahan kecurangan, dengan demikian akan dibuat hipotesis sebagai berikut.

H₂ :Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*

2.9.4 Pengaruh Tingkat Religiusitas terhadap pencegahan *fraud*

Religiusitas bisa diartikan sebagai satu sistem yang kompleks dari kepercayaan keyakinan dan sikap-sikap dan upacara-upacara yang menghubungkan individu dengan satu keberadaan atau kepada sesuatu yang bersifat ketuhanan. Religiusitas adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang komprehensif, yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang beragama (*being religious*), dan bukan sekadar mengaku mempunyai agama (*having religion*). Religiusitas meliputi pengetahuan agama, keyakinan agama, pengamalan ritual agama, pengalaman agama, perilaku (moralitas) agama, dan sikap sosial keagamaan. Dalam Islam, religiusitas pada garis besarnya tercermin dalam pengamalan akidah, syariah, dan akhlak, atau dengan ungkapan lain: iman, Islam, dan ihsan. Bila semua unsur itu telah dimiliki oleh seseorang, maka dia itulah insan beragama yang sesungguhnya.

Religiusitas merupakan suatu keadaan, pemahaman dan ketaatan seseorang dalam meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengamalan nilai, aturan, kewajiban sehingga mendorongnya bertingkah laku, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari (Ghufron, 2012). Religius personal menunjukkan titik awal untuk menemukan perbedaan jugmen moral, karena ideologi religius menemukan penjelasan mengenai judgment tentang salah dan benar (Reni, 2000). Studi etika dari para manajer bisnis lebih dari 100 manajer bisnis yang dinyatakan mengenai arti etika bagi mereka 45% persen mendefinisikan etika adalah bagian dari religius etika adalah sesuai golden rule yang dinotasikan dengan religiusitas para peneliti kemudian melihat pengaruh positif religiusitas terhadap penalaran moral terdapat korelasi anantara penalaran moral dengan religiusitas. Pengaruh religius dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan akuntansi.

Menurut penelitian Basri (2017) pengaruh religius sama dengan moralitas yang dapat mencegah dari kecurangan akuntansi baik dalam ruang lingkup perusahaan maupun dalam pemerintahan sehingga dapat disimpulkan bahwa religius berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan fraud hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Urumsah (2018) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara religius terhadap tindak kecurangan akuntansi. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis untuk penelitian ini adalah

H₃ : Tingkat Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan

2.9.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pencegah *Fraud*

Adanya sistem akuntansi yang memadai, menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para pemilik atau pemegang saham, kreditur dan para pemakai laporan keuangan (*stakeholder*) lain yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Sistem akuntansi yang bagus adalah sistem akuntansi yang didalamnya mengandung system pengendalian yang memadai.

Pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisien dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku (Susanto 2013). Sehingga dengan adanya tujuan sistem pengendalian internal bahwa dapat menjaga keandalan pelaporan keuangan, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena sistem pengendalian internal dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi, sehingga akan menghasilkan laporan yang benar, melindungi atau membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan penggelapan-penggelapan, kegiatan organisasi dapat dilaksanakan dengan efisien. Pengendalian internal menjadi suatu cara yang dapat memberikan arahan serta mengawasi sumber daya suatu organisasi serta memiliki peran dalam pencegahan penggelapan atau *fraud*, dan melindungi sumber daya organisasi. Menurut Ariesta (2013), hasil evaluasi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa masih terdapat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini Tidak Wajar dan memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut Novani (2018) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian Indriani (2016) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah terbukti berpengaruh positif. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai sistem pengendalian intern pemerintah, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄ : Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)